

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI MAKASSAR

MUH IKRAM IDRUS¹ IRMA²

Ilmu Ekonomi Stadi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar
(Ikram@unismuh.ac.id)

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out variables that have a significant influence on Local Revenue in the city of Makassar. The type of research used is quantitative research, with data collection methods using documentation taken from the Central Bureau of Statistics of South Sulawesi province and related agencies. Data taken in the form of data from 2011-2015, and data processing techniques using multiple linear regression with the help of software SPSS 16 windows. The results of the analysis in this study can be concluded, together Variable Consumption of the Government and the Number of Population positif and significant effect on the Original Revenue. Partially, only expenditure variable that has no significant effect on Local Own Revenue (PAD) Makassar City. The number of residents is one of the factors that have the highest influence, therefore there should be a government program that can increase the immigrants from other areas, especially in South Sulawesi Island to Makassar city, so that the city of Makassar is not only a transit city but also the City of choice to do economic activity.

Keywords: *Local Revenue, Government Expenditure, Population*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui variabel apa saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi yang diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan dan instansi-instansi terkait. Data yang diambil berupa data tahun 2011-2015, dan teknik pengolahan data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 16 windows. Hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan, secara bersama-sama Variabel Pengeluaran pemerintah dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Secara parsial, hanya Variabel Pengeluaran yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Jumlah Penduduk adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh tertinggi, untuk itu perlu ada program pemerintah yang dapat meningkatkan pendatang dari daerah-daerah lain khususnya di Pulau Sulawesi Selatan ke kota Makassar, sehingga Kota Makassar tidak hanya menjadi kota transit tapi juga menjadi Kota pilihan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kabupaten dan kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti yang tercantum dalam dalam UU RI No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU RI No.32 tahun 2004 Tentang pembagian urusan pemerintah, juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, ada 16 kewenangan yang di miliki oleh undang-undang di tentukan menjadi urusan pemerintah pusat, yaitu, politik luar negri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang optimal, maka diberlakukanlah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini di atur dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Desentralisasi fiskal yang di atur dalam UU Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari tiga macam yaitu pajak daerah (*tax assignment*), dana bagi hasil (*revenue sharing*) dana alokasi umum serta dana alokasi khusus. Desentralisasi fiskal inipemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga pemerintah daerah mandiri dalam pengelolaan keuangannya dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga bertugas untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan fiskal di daerah, pemerintah pusat memberikan dana perimbangan.

Dalam UU RI No.33 tahun 2004 pasal 3 tentang perimbangan keuangan dijelaskan dana pemerintahan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah . Dana perimbangan ini terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana perimbangan ini terdiri bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi kusus. Berdasarkan UU RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keungan, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Soleh dan Rochmansjah Tentang perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat).menjelaskan bahwa sumber penerimaan daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi untuk saat ini masih didominasi oleh bantuan dan sambungan dari pemerintah pusat baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil, sedangkan proporsi PAD masih relatif kecil.

Adanya dana perimbangan melalui DAU ini ternyata justru menjadi ketergantungan. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan resmi daerah yang terus diupayakan untuk di tingkatkan agar dapat membantu dalam memikul sebagian beban biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kegiatan pembangunan yang semakin meningkat sehingga kemandirian dan otonomi daerah yang semakin nyata, dinamis dan bertanggung jawab dapat terwujudkan. Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator tentu membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, termaksud anggaran belanja dalam rangka terlaksananya pembagunan yang berkesinambungan.

Pengeluaran tersebut sebagian digunakan untuk administrasi pembagunan dan sebagian lainnya untuk kegiatan pembagunandi berbagai jenis infrastruktur yang penting. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat-agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi maka aliran penerimaan pemerintah melalui PAD juga meningkat.

LANDASAN TEORI

Penyelenggaraan otonomi di tingkat profinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang tidak atau belum di laksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan pemerintah lainya.(safitri,2009). Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonom adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan menggali sumber- sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuagannya sendiri untuk membiayai penyelengaran pemerintah; (2) Ketergantugan kepada bantuan pusat harus seminal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang di dukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat daerah.(landiyanto,2005).

Halim Abdul & mujib ibnu (2009) menjelaskan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu berupa sistem keuangan daerah yang di atur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan tanggung jawab antar tingkat pemerintah sesuai dengan peraturan UU tentang Pemerintah Daerah. UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintah Dearah meliputi ruang lingkup pengaturan dari :

1. Prinsip-prinsip Pembiayaan Fungsi Pemerintah di Daerah
2. Sumber-sumber Pembiayaan Fungsi dan Tugas Tanggung Jawab Daerah yang meliputi :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - b. Dana perimbangan
 - c. Pinjaman
 - d. Pembiayaan pelaksanaan asa dekonsentrasi bagi provinsi
3. Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah
4. Sistem informasi keuangan daerah

Pendapatan asli daerah

Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah adalah sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional ,demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos penerimaan investasi serta pengelolaan Sumber Daya alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan bener sehingga memberikan hasil maksimal (Elita, 2007)

Sumber pendapatan asli daerah

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.(safitri,2009).

Prakosa (2003) menjelaskan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan UU RI No.34 tahun 2000, pajak daerah kota/ kabupaten terdiri dari :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan c
7. Pajak parker

Belanja daerah

Berdasarkan pemandagri No.13 tahun 2006, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/ kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam permendagri No 13 tahun 2006 pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Yang termasuk urusan wajib adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Kesehatan
- b. Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat
- c. Penataan ruang dan Perencanaan pembangunan
- d. Perhubungan dan Pertanahan
- e. Lingkungan hidup dan Pertanahan
- f. Kependudukan dan catatan sipil
- g. Pemberdayaan perempuan dan Sosial
- h. Tanpa kerja dan Koperasi dan usaha kecil dan menengah

- i. Penanaman modal dan Kebudayaan
- j. Pemuda dan olahraga dan Kesatuan bangsa dan politik luar negeri
- k. Pemerintahan umum dan Kepegawaian
- l. Pemberdayaan masyarakat dan desa dan Statistik
- m. Arsip dan Komunikasi dan informatika

Hubungan pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap PAD

Pendapatan asli daerah di pengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk merupakan hubungan fungsional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sebagai objek penelitian dengan menetapkan data Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk yang di peroleh dari Dinas Pendapatan Asli Daerah (DISPENDA) Provinsi Sulawesi selatan yang berlokasi di JL A.P. Pettarani No. 1, Mannuruki, Makassar dan data Pendapatan Asli Daerah, jenis penelitian ini penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan merupakan data *time series* tentang Pendapatan Asli Daerah. Untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Secara matematis model persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \mu$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (RP)

α = Kofisien Konstanta

β_1, β_2 = Kofisien regresi

X1 = Pengeluaran pemerintah (RP)

X2 = Jumlah penduduk (orang)

μ = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rincian penerimaan Daerah Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Kota Makassar tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Penerimaan	Satuan Rupiah				
Bagian	345.350.5	556.202.	621.247.6	742.448.	828.871.

Pendapatan Asli Daerah	62.825	758.215	79.844	756.714	892.852
Pajak Daerah	266.065.5	388.445.	518.703.0	561.697.	635.674.
	76.931	926.266	83.895	247.681	206.877
Retribusi Daerah	58.015.14	69.257.4	79.650.93	135.776.	115.220.
	5.863	10.559	6.626	884.790	022.385
Penerimaan lain-lain	14.914.63	20.820.9	22.532.21	33.138.9	64. 615
	9.885	18.675	7.115	80.058	.641.548
Dana Perimbangan	905.316.2	1.105.46	1.161.279.	1.836.09	1.402.78
	78.541	3.603.65	547.759	0.960.67	7.592.48
		4		1	4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	470.533.2	455.689.	578.831.3	62.738.0	720.970.
	78.541	010.688	48.309	13.240	425.400
2.060.195.482.586 2.595.879.628.057					
2.982.244.813.548 3.371.890.843.154 3.768.139.781.446					

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar , Tahun 2015

Perkembangan Jumlah Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar
Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Satuan Rupiah)	Realisasi (Satuan Rupiah)
2011	345.355.311.000	397.054.800.801
2012	441.234.952.000	556.202.758.215
2013	563.891.202.000	621.247.679.844
2014	831.661.960.000	742.448.756.714
2015	992.147.612.000	828.871.892.852

Sumber : **Badan Pusat Statistik (BPS) KotaMakassar Tahun 2015**

Berdasarkan Tabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar secara keseluruhan dapat dikatakan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 target Pendapatan Asli Daerah Rp.345.355.311.000. milyar dan realisasi sebesar Rp.397.054.800.801 , kemudian pada tahun 2012 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 441.234.952.000 dan realisasi sebesar Rp.556.202.758.215, selanjutnya di tahun 2013 target meningkat Rp.563.891.202.000. dengan

realisasi sebesar Rp.621.247.679.844. Pada tahun 2014 target mencapai sebesar Rp. 831.661.960.000 dengan realisasi sebesar Rp. 742.448.756.714 dan terus berlanjut sampai 2015.

Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kota Makassar Rincian Kegiatan Yang Berpengaruh Terhadap Pengeluaran Pemerintah Tahun 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Pengeluaran	(Satuan Rupiah)				
B.Pegawai	1.072.077.237.541	1.076.398.167.309	1.119.417.564.276	1.416.545.867.596	1.519.242.682.140
B. Barang	403.634.280.721	535.515.018.617	541.234.561.112	559.346.631.714	621.313.267.412
B. Pemeliharaan	168.460.026.058	318.062.312.409	341.217.127.887	359.318.217.817	421.213.315.817
Subsidi	27.177.912.236	8.315.550.000	9.523.345.661	10.612.412.653	18.318.650.875
	1.671.349.456.556	1.938.291.048.335	2.011.392.598.936	2.345.823.129.780	2.580.087.916.244

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2015

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
P A D	27.1320	.28700	5
Pengeluaran Pemerintah	28.0020	.43586	5
Jumlah Penduduk	14.1480	.02864	5

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Hasil Analisis Deskriptif diatas diketahui bahwa hasil data yang diperoleh dalam kurung waktu 5 tahun terakhir, hasil data PAD kurung 5 tahun terakhir untuk nilai Mean sebesar 27.1320 dan untuk nilai Standar Deviation sebesar

28700. Hasil data Pengeluaran Pemerintah dalam kurung waktu 5 tahun terakhir untuk nilai Mean sebesar 28.0020 dan untuk nilai Standar Deviation sebesar 43586, dan untuk hasil data jumlah penduduk dalam kurung waktu 5 tahun terakhir untuk nilai Mean sebesar 14.1480 dan untuk nilai Standar Deviation sebesar 0.2864

Rekafitulasi Hasil Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi (B)	T	Sig
Pengeluaran Pemerintah	0,058	0,614	0,602
Jumlah Penduduk	10.360	7,160	0,019
Konstanta = 121.080 R = 0,986 R square = 0,972 F hitung = 34,565 Signifikan F = 0,028			

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan pada hasil koefesien regresi (B) di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 121,080 + 0,058 X_1 + 10,360 X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 121,080, maka apabila pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk bernilai konstan, maka nilai dari pendapatan asli daerah 121,080
2. Nilai koefesien regresi pengeluaran pemerintah 0,058, maka apabila pengeluaran pemerintah meningkat sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,058 satuan sedangkan yang lainnya konstan
3. Nilai koefesien jumlah penduduk sebesar 10,360, maka apabila jumlah penduduk meningkat 1satuan maka akan meningkat Pendapatan Asli Daerah sebesar 10,360 satuan sedangkan yang lainnya konstan

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change	
1	.986 ^a	.972	.944	.06806	.972	34.565	2	2	.028	2.983
Sumber : Output Analisis Regresi Berganda										
a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pemerintah										
b. Dependent Variable: P A D										

4. Hasil analisis regresi berganda diperoleh nilai R sebesar 0,986. Hasil ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X1) dan jumlah penduduk (X2) mempunyai keeratan hubungan dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) sebesar 0,986. Pada penelitian ini untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil R square di dapat 0.972 (diperoleh dari pengkuadratan R yaitu = $0,986 \times 0,986$). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar sebesar 97,2% sisanya 8,8% di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini

Hasil Perhitungan Uji F (secara simultan)

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.320	2	.160	34.565	.028 ^a
	Residual	.009	2	.005		
	Total	.329	4			
Sumber : Output SPSS 16						
. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran						

Pemerintah				
b. Dependent Variable: P A D				

5. Hasil analisis regresi berganda, variabel pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan atau bersama-sama menunjukkan hasil nilai Fhitung adalah sebesar 34.565 dengan signifikan F sebesar 0.028^a atau lebih dari 0,05 (5%) sehingga menolak H₀. Hasil ini menyatakan bahwa secara simultan semua variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Perhitungan Uji t (Secara Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	121.080	22.098		5.479	.032
	Pengeluaran Pemerintah	.058	.095	.089	.614	.602
	Jumlah Penduduk	10.360	1.447	1.034	7.160	.019

Sumber : Output Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan uji parsial melalui analisis regresi berganda. Diperoleh hasil variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah (X₁) dan jumlah penduduk (X₂) terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah (Y) secara parsial dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah
 Analisis regresi menunjukkan koefisien regresi (*B*) sebesar 0.058 terhadap Pendapatan Asli Daerah, dengan signifikan 0.602. Berdasarkan probabilitasnya, jika probabilitasnya lebih kecil 0.05 maka H₁ diterima dan H₀ ditolak atau variabel tersebut berpengaruh signifikan. Dari hasil perhitungan diketahui signifikansi

sebesar 0.602 bila dibandingkan dengan taraf signifikansi 0,05, menunjukkan nilai signifikansi lebih dari taraf signifikansi ($0,602 > 0,05$) sehingga H1 ditolak dan H0 diterima, dengan demikian pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Correlations				
		P A D	Pengeluaran Pemerintah	JumlahPenduduk
Pearson Correlation	P A D	1.000	.501	.983
	PengeluaranPemerintah	.501	1.000	.570
	JumlahPenduduk	.983	.570	1.000
Sig. (1- tailed)	P A D	.	.195	.001
	PengeluaranPemerintah	.195	.	.158
	JumlahPenduduk	.001	.158	.
N	P A D	5	5	5
	PengeluaranPemerintah	5	5	5
	JumlahPenduduk	5	5	5

PENUTUP

SIMPULAN

1. Secara parsial variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikan $0,602(0,602 > 0,05)$, dan variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan tingkat signifikansi $0,019(0,019 < 0,05)$.
2. Secara simultan atau bersama-sama kedua variabel X (pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk) berpengaruh signifikan terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dengan tingkat signifikansi $0,028^a(0,028 < 0,05)$.
3. Secara uji R dan R^2 menunjukka kedua variabel yaitu variabel X1 (Pengeluaran Pemerintah) dan X2 (Jumlah Penduduk) mempunyai keeratan hubungan yang signifikan dengan variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) sebesar $0,986$ dan R square sebesar $0,972$. Angka ini menunjukka bahwa kontribusi semua variabel bebas terhadap variabel terikat mempunyai keeratan hubungan.

SARAN

Sebaiknya pemerintah lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah Pendapatan asli daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga ketergantungan biaya pemerintah tidak terlalu besar.

Daftar Pustaka

- Abdurrahaman, "Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah", Jakarta : MSP, 1987.
- Atmaja, Arif Eka " Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli Daerah Kota Semarang" Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2011.
- Atep Adya Barata. "Pendapatan asli daerah." terjemahkan Barata, Jakarta 2004
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar "Statistik Indonesia"
- Datu, Indra Rindu. " Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar "Skripsi. Makassar: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, 2012.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2001.
- Ghozali, Imam. "Ekonomi Teori, Konsep dan Aplikasi". Badan Penerbit Undip, 2009.
- Halim, Abdul dan Mujib Ibnu. "problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat- Daerah". Tesis, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2009.
- Haryanto, "Kemandirian Daerah Sebuah Prepektif Dengan Metode Path Analisis". Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hasibun, Nurimansyah. "Otonomi dan Desentralisasi Keuangan Daerah". Jakarta: Prisma, 1991.
- Hirawan, Susiyati. "Pengaruh Undang-Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah" Skripsi. Yogyakarta : BPFE UGM, 1997.
- Indrianto. "Metodologi Untuk Aplikasi Dan Bisnis" Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Rahim, A. R., Rasulong, I., Jusriadi, E., & Adzim, F. (2016). STRATEGI IMPLEMENTASI MODEL PENGEMBANGAN WIRUSAHAWAN MUDA BAGI MASYARAKAT PESISIR KABUPATEN TAKALAR. *Balance*, 14(02).
- Rahman, A., & Rasulong, I. (2015). Empowerment of Creative Economy to Improve Community Incomes in Takalar Regency. *IOSR Journal of Business and Management* Ver, 17(4), 2319-7668.
- Rasulong, Ismail. "PEMAHAMAN NASABAH TENTANG KONSEP MUDHARABAH (Studi Pada BMT Ditha Anugerah Abadi Makassar)." *Jurnal Ekonomi Balance* 7.1 (2011): 32-42.

Rasulong, Ismail. "PEMAHAMAN NASABAH TENTANG KONSEP MUDHARABAH (Studi Pada BMT Ditha Anugerah Abadi Makassar)." *Jurnal Ekonomi Balance* 7.1 (2011): 32-42.

Landiyanto, "*Kinerja keuangandan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah*", *CURES working paper No 05/01,2005*.

NN, 2003, "*Pendapatan Asli Daerah*" Erlangga, jakarta

Prakosa. "*Pajak dan Retribusi Daerah*". Yogyakarta: UII Press, 2005.

Sugiyono. "*Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*" Bandung : Alfabeta, 2012.

Sihaan, Marihot. "*Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*". Jakarta: Erlangga,2007.

Sutrisno 1987: 200, "*Konsep Pendapatan Asli Daerah*" Rajawali

Santono dan Rahayu.. "*Analisis Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri*". *Dinamika Pembangunan* Vol.2.No.1, 2005.

Sholeh dan Rochmansjah. "*Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*". Bandung: Fokus media, 2010.